

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Muhtarom (2015) melakukan sebuah penelitian yang menggunakan penelitian eksplanatori, yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui hasil bahwa tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan disebabkan karena jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus naik namun tidak diikuti oleh Kesejahteraan Masyarakat yang diindikasikan oleh IPM (Index Pembangunan Manusia) yang tidak stabil bahkan beranjak naik. Angka Harapan hidup yang cenderung tetap setiap tahunnya, Index pendidikan yang terus naik 2010-2014 tetapi tidak cukup signifikan dan besar. Hingga index daya beli masyarakat Lamongan yang cenderung naik namun tidak terlalu besar. Menjadikan variabel penelitian tidak signifikan.

Putra dan Fandi (2022) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara Good Corporate Governance dan kesejahteraan Masyarakat dari pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode menggunakan pendekatan kuantitatif, sampel yang diambil adalah 100 responden yang menyebar pada pejabat yang ada di kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan, uji asumsi klasik, uji normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, selanjutnya Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan

dan Variabel Dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Kesejahteraan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Gresik.

Penelitian oleh Suganda (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan lokal dan pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Barat menunjukkan hasil yang berbeda. Setelah dilakukan penelitian berdasarkan uji hipotesis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Siswiyanti (2015) Pembangunan infrastruktur di suatu daerah sangat mempengaruhi laju perekonomian daerah. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Sesuai dengan Teori Pertumbuhan Endogen yang menyatakan bahwa salah satu sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal. Analisis menunjukkan PAD, DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap perekonomian Pertumbuhan. Dan hasil analisis juga menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat digunakan sebagai variabel intervening (mediasi) hubungan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian lain oleh Sukmawati (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mediasi belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di mediasi dengan belanja daerah pada Provinsi Jawa Timur.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat serta mampu mengelolanya dengan maksimal dan baik sehingga dapat dilihat bahwa peran dari otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerahnya telah berjalan dengan baik. Tidak hanya melihat dari sumber daya yang dapat diberdayakan dengan baik, namun Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat tiap periodenya merupakan dambaan bagi setiap daerah karena dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat itulah menandakan pemerintah daerah telah melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

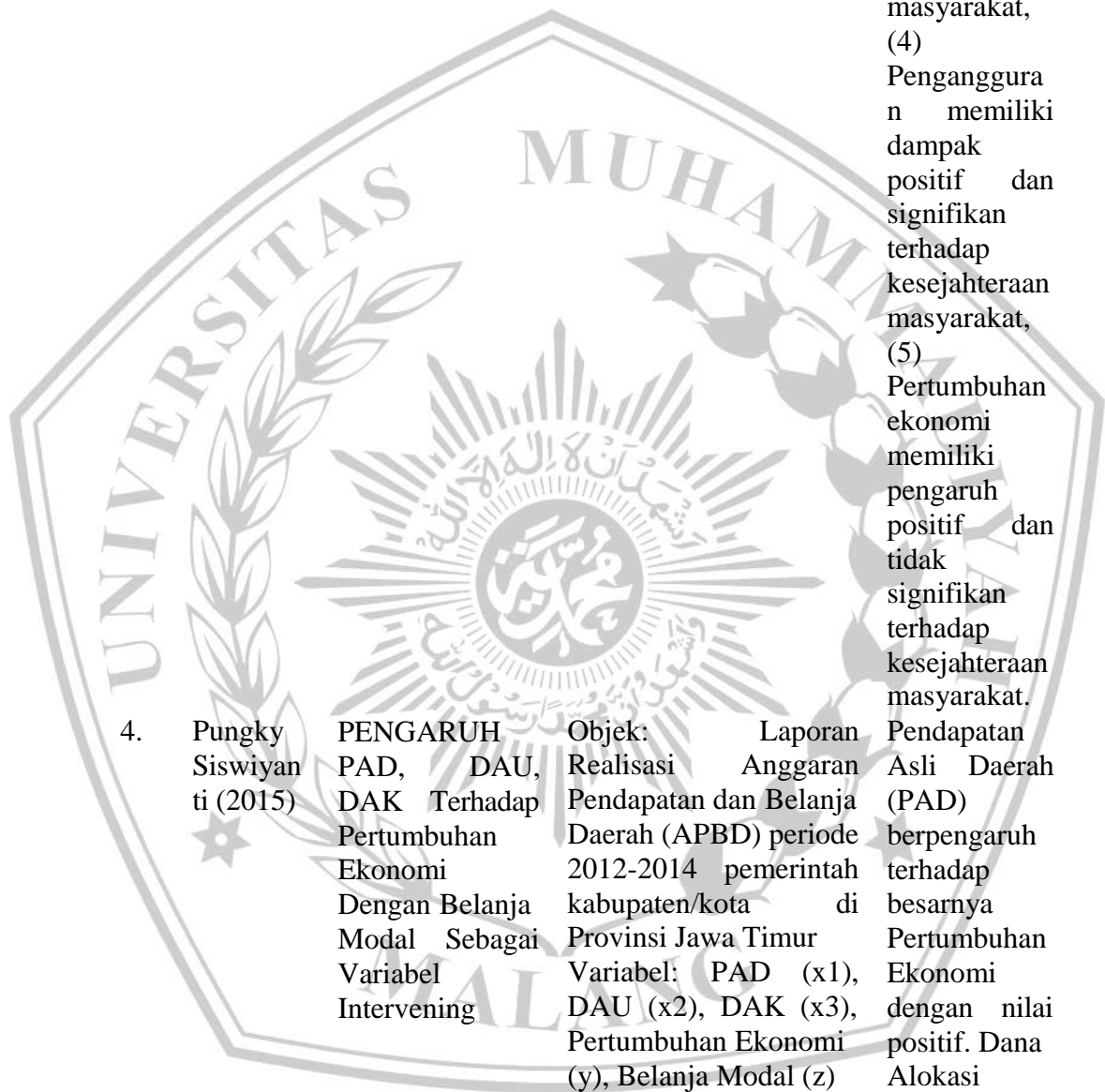
| No | Nama (Tahun) | Judul/Jurnal | Objek/Variabel/Analisis | Hasil |
|----|----------------------|--|---|---|
| 1. | Abid Muhtarom (2015) | Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan | Objek : Kabupaten Lamongan Variabel : Analisis PAD (x1), Kesejahteraan Masyarakat(y) Teknik Analisis : Eksplanatori | Dari analisis dapat kita lihat bahwa tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah |

| Periode Tahun 2010-2015 | dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan disebabkan karena jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus naik namun tidak diikuti oleh Kesejahteraan Masyarakat yang diindikasikan oleh IPM (Index Pembangunan Manusia) yang tidak stabil bahkan beranjak naik Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, selanjutnya Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan dan Variabel Dana alokasi | |
|---|---|--|
| 2. Allen Pranata Putra, Adam Rio Fandi (2022) | Pengaruh Good Corporate Governance, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gresik | Objek : 100 responden (Pejabat di Kab. Gresik) Variabel : GCG(x1), PAD(x2), Dana Alokasi Umum (x3), Belanja Modal (x4), Kesejahteraan Masyarakat (x5), Pertumbuhan Ekonomi(y) Teknik Analisis: Kuantitatif |



3. Ariès Suganda (2018) Pengaruh PAD dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kab/Kota Prov. Kalimantan Barat 2012-2016) Objek : Variabel: PAD (x1), Tingkat Pengangguran (x2), Kesejahteraan Masyarakat (y1), Pertumbuhan Ekonomi (z1) Teknik Analisis: Analisis Jalur

umum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Kesejahteraan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten Gresik. (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) Pengangguran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (3) Pendapatan



4. Pungky Siswiyanti (2015) PENGARUH PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Objek: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2012-2014 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Variabel: PAD (x1), DAU (x2), DAK (x3), Pertumbuhan Ekonomi (y), Belanja Modal (z) Teknik Analisis: Analisis Jalur Path lokal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, (4) Pengangguran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, (5) Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai positif. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi



5. Rima Mega Sukmawati (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Mediasi dengan nilai positif. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai negatif. Belanja Modal dapat menjadi variabel mediasi (intervening) antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi.
- Objek: 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018
- Variabel: PAD (x1), DAU (x2), DAK (x3), Pertumbuhan Ekonomi (y), Belanja Daerah (z)
- Teknik Analisis: Regresi Linear Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan



terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
pada
Kabupaten/
Kota di
Provinsi
Jawa Timur.
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD) dan
Dana Alokasi
Umum
(DAU)
mempunyai
pengaruh
positif
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
dengan
mediasi
belanja
daerah,
sedangkan
Dana Alokasi
Khusus
(DAK)
berpengaruh
negatif dan
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi di
mediasi
dengan
belanja
daerah pada
Provinsi Jawa
Timur.

B. Teori dan Tinjauan Pustaka

A. Teori Agensi

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang ke pada agen untuk mengambil keputusan atas nama principal, Jensen dan Meckling (1976 dalam Yovita 2011). Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. (Lupia & McCubbins 2000 dalam Halim & Abdullah 2006).

Agent dilibatkan oleh Principal dalam melakukan beberapa tanggung jawab dalam bentuk perjanjian. Teori keagenan bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian antara dua orang atau lebih, organisasi atau kelompok. Sektor publik negara dapat diterapkan dengan teori keagenan. Teori keagenan digambarkan dengan interaksi keagenan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat selaku prinsipal dan daerah selaku agen. Di satu sisi pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas pemerintah pusat yang menyerahkan kekuasaan, di sisi lain daerah juga harus memperhatikan kesejahteraannya sendiri. Penerapan teori agensi dalam konteks ini membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pemerintah sebagai Agen dan masyarakat sebagai Principal, untuk mencapai tujuan Bersama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang no.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), Pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain - lain pendapatan yang sah.

C. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi suatu daerah. DAU ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) di suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

D. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan (Kemenkeu RI).

Tingginya kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sarana, prasarana dan infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Adapun penyediaan sarana, prasarana maupun infrastuktur dilakukan Pemerintah Daerah melalui belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada suatu daerah seharusnya mampu meningkatkan sumber dana melalui pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi suatu daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk akan meningkat pula.

E. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera, karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

C. Perumusan Hipotesis

a) PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Teori agensi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana adanya kelompok atau individu bertindak sebagai agen yang rasional dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka terhadap principal. Teori agensi menekankan bahwa individu atau kelompok sebagai agency memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada informasi yang tersedia dan untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka sendiri. Teori agensi menyoroti pentingnya pengelolaan yang efisien dan efektif dari

sumber daya. Dengan pendapatan yang lebih besar dari PAD, pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Ini dapat berarti peningkatan dalam pengelolaan keuangan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penelitian Wahyuni (2020), Irvan dan Karmini (2016), Edy dan Marhamah (2016) menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan sumber daya keuangan yang besar oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program sosial lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Meskipun PAD tidak seluruhnya mampu membiayai APBD, keseluruhan penerimaan tersebut tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. (Saputra et al, 2023)

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

b) DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Teori agensi menekankan bahwa pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana dana tersebut benar-

benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu teori agensi juga menyoroti peran agen dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam hal DAU, pemerintah sebagai agen dapat menggunakan dana tersebut untuk menerapkan kebijakan yang mereka yakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, agar pelayanan untuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Anis dan Ardi (2007), Kuncoro (2004) menyatakan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Mahendra dan Agung (2015) dana alokasi umum memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sama halnya seperti pendapatan daerah lainnya, yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan

pendidikan.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

c) Belanja Modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal.

Yovita (2011) Belanja modal hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melaksanakan aktivitas pembangunan. Modebe,dkk (2012) juga berpendapat bahwa adanya infrastruktur berkualitas maka produktivitas juga akan meningkat. Belanja modal yang meningkat diharapkan bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih baik karena aset tetap daerah yang meningkat merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat adalah hasil dari pengeluaran belanja modal (Utami dan Indrajaya 2019).

Meningkatnya pendapatan daerah dapat memungkinkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM jika dana tersebut dialokasikan tepat sasaran. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan pemerintah daerah seharusnya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat yang berkaitan dengan program kepentingan publik seperti melakukan aktivitas pembangunan

sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terciptanya berbagai program kepentingan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya dapat mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

H3: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

d) Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Dalam Agency Theory, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Jaya dan Dwirandra (2014). Keduanya menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PAD, daerah menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal.

Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peningkatan PAD

yang berdampak Belanja modal dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain naiknya pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat.

H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

e) Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat meralisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan

menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD (Talanganin. Dkk, 2018). DAU berperan sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah belanja modal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan peran PAD sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian lainnya oleh Taaha et all (2009) menemukan hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan Belanja Modal mampu mendorong pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan multiple effect sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi kenaikan DAU yang diberikan oleh pemerintah daerah maka akan mempengaruhi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

H5: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

f) Belanja Modal memediasi PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, pembiayaan sarana dan prasana melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan

prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lainlain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Penyusunan PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Selain penyediaan fasilitas fisik, hasil dari pajak dan retribusi daerah dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreatifitas dan menarik minat masyarakat untuk turut serta, sehingga ediharapkan dengan adanya kegiatankegiatan tersebut ditambah lagi dengan tersedianya fasilitas publik baru, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat akan tercipta yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013); Sugiathi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Grade (2019) menunjukkan hasil bahwa Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin besar belanja pemerintah yang dialokasikan pada belanja modal, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

H6: PAD berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Modal

g) Belanja Modal memediasi DAU terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal (Belanja Modal) yang membedakannya,

Penelitian oleh Oktriniatmaja (2011) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. DAU merupakan sumber utama pembiayaan bagi daerah untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di tujuh daerahnya sebagai akibat tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Penelitian lainnya oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) memperkuat basis teori penyusunan anggaran yang bersifat incrementalism, yaitu alokasi anggaran belanja akan menyesuaikan dengan bertambah/berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah.

Untuk mengoptimalkan dan mengelola anggaran daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka diperlukan pengelolaan anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan regional (Kuncoro, 2003).

Kesejahteraan Masyarakat juga memiliki berhubungan dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah.

H7: DAU berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Modal

D. Kerangka Penelitian

